

Masa Pemerintahan VOC di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC

Rosmaida Sinaga¹ Juan Vito Simanjuntak² Ocha Primalia Tondang³ Suci Larasati⁴

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹ juanvitos2109@gmail.com² ochaprimalia@gmail.com³
ucayy309@gmail.com⁴

Abstract

This article discuss the Vereenigde Oostindische Compagnie, also commonly known as the VOC, which was a Dutch trading company that was a legal entity and granted special privileges by the Dutch government itself, akin to a sovereign state, possessing the greatest wealth in history, and established on March 20, 1602, with the aim of monopolizing trade in the East Indies, focusing on the sale of spices. The writing of this article is motivated by the purpose and objectives of the establishment of the VOC and its governance period in the Archipelago, where the position of the VOC in the Archipelago is a significant milestone and historical root that is important to remember in Indonesian history, as during its period, the presence of the VOC was the precursor to the emergence of colonialism throughout the East Indies or the Archipelago. The VOC period in the Archipelago also marked various cultural acculturations that spread to Indonesia through the implementation of policies carried out. Initially, the VOC came as a trading company, but due to its privileges, the VOC became a political and military power with significant influence in the East Indies. During the VOC's rule and monopoly due to the privileges granted by the Dutch government itself, the VOC experienced a peak of success due to the production of spices, but then faced collapse and losses due to corruption and nepotism, which led to an increase in debt for the VOC, causing this trading company to dissolve in 1799. The writing of this article uses historical research methods based on heuristic studies by collecting and integrating various historical sources through books and other supporting articles.

Keywords: VOC, Archipelago, Trade Monopoly

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Vereenigde Oostindische Compagnie atau yang sering disebut juga sebagai VOC dimana merupakan sebuah perusahaan kongsi dagang Belanda yang berbadan hukum juga diberi hak istimewa oleh pihak kerajaan Belanda itu sendiri bak sebuah negara berdaulat dan memiliki kekayaan terbesar sepanjang sejarah dan didirikan pada 20 maret 1602, dengan tujuan untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah Hindia-Timur yang berfokus kepada penjualan rempah-rempah. Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan dari didirikannya VOC juga masa-masa pemerintahannya selama di Nusantara, yang dimana kedudukan VOC di Nusantara merupakan tonggak dan akar sejarah yang penting di ingat dalam sejarah Indonesia, sebab pada periodesasinya kehadiran VOC merupakan cikal bakal hadirnya kolonialisme di seluruh wilayah Hindia-Timur atau Nusantara. Masa-masa VOC di Nusantara juga mencetak berbagai alkulturasi budaya yang merambat ke Indonesia melalui penerapan kebijakan yang dilakukan. Pada awalnya VOC datang sebagai perusahaan dagang, namun karena hak istimewanya VOC menjadi kekuatan politik dan militer yang memiliki pengaruh kuat di Hindia-Timur. Selama VOC memerintah dan melakukan monopoli akibat hak istimewa yang diberikan oleh kerajaan Belanda itu sendiri, VOC mengalami puncak kejayaan akibat penghasilan rempah-rempah hingga mengalami keruntuhan dan kerugian akibat tindakan korupsi dan nepotisme yang terjadi yang membuat pembengkakan hutang kepada VOC sehingga perusahaan kongsi dagang ini bubar pada tahun 1799. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang berdasarkan kajian heuristik dengan mengumpulkan dan memadukan berbagai sumber-sumber sejarah lewat buku dan artikel pendukung lainnya.

Kata Kunci: VOC, Nusantara, Monopoli Perdagangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau perusahaan dagang Hindia Timur merupakan kongsi dagang yang diberi otoritas oleh pihak kerajaan Belanda untuk melakukan monopoli di wilayah Hindia Timur dan didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda, VOC memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam penguasaan dan pengelolaan perdagangan di wilayah Nusantara, yang pada masa dikenal dengan nama Hindia Timur. Perusahaan ini memiliki kekuasaan yang besar dan diberi hak istimewa oleh pihak kerajaan Belanda termasuk untuk membuat pemeritahan dan mendirikan angkatan militer juga mengeluarkan mata uang sendiri di wilayah yang dikuasainya. Kedatangan VOC di Indonesia ialah dengan maksud untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara dan yang dikenal saat ini dengan Indonesia. Selama VOC di Nusantara, banyak mendirikan berbagai pos perdagangan dan benteng militer untuk memperkuat kendali mereka dalam melakukan monopoli. VOC juga berperan dalam proses kolonisasi dan perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan dan kekuasaan kolonial diserahkan kepada pemerintahan kerajaan Belanda.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan yang menggunakan pendekatan analisis dan studi literatur melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini menekankan pada analisis kritis terhadap informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang signifikan. Langkah-langkah yang terlibat dalam metode ini meliputi identifikasi sumber literatur yang kredibel, evaluasi kualitas dan relevansi sumber, analisis data yang diperoleh, sintesis temuan, dan penyusunan laporan yang komprehensif dan objektif. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dikaji, serta untuk menghasilkan argumen yang didukung oleh bukti empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam buku sejarah Nasional Indonesia IV, VOC digambarkan sebagai salah satu aktor kunci dalam sejarah kolonial di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Hindia Timur yang sekarang ini dikenal sebagai Indonesia. Dengan dibentuknya VOC, Belanda berusaha mengkonsolidasikan dan memperkuat posisinya di pasar rempah-rempah yang dinilai menguntungkan dan sesuai dengan prinsip kapitalisme mereka. VOC merupakan bentuk perusahaan dagang yang unik pada masanya, dikarenakan memiliki kekuasaan yang jauh melampaui peran perdagangan biasa. Perusahaan ini diberi hak istimewa oleh pemerintahan kerajaan Belanda untuk mengelola dan mengatur urusan perdagangan serta melakukan hubungan diplomatik dan militer di wilayah Asia. Dalam hal ini, VOC berfungsi tidak hanya sebagai badan perekonomian tetapi juga sebagai badan pemerintahan dan kekuatan militer. Dengan demikian, VOC memiliki otoritas untuk membuat perjanjian, mengelola administrasi, dan mengatur keamanan di wilayah-wilayah yang dikuasainya.

Dalam prakteknya, VOC mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng-benteng di berbagai lokasi strategis di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Batavia (sekarang Jakarta), yang dibangun sebagai pusat administratif dan perdagangan VOC di Asia Tenggara. VOC juga menguasai Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai pusat produksi rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Dengan mengontrol daerah-daerah ini, VOC dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengatur harga di pasar global, memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Namun, kekuasaan VOC tidak hanya terbatas pada perdagangan. VOC juga memiliki tentara dan angkatan laut sendiri, yang digunakan untuk menjaga keamanan

perdagangan dan melawan pesaing, baik dari negara-negara Eropa lain maupun dari kekuatan lokal. Dalam konteks ini, VOC sering terlibat dalam konflik militer dan politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara.

VOC juga mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Penguasaan VOC atas perdagangan rempah-rempah seringkali disertai dengan pengenaan pajak yang tinggi, sistem kerja paksa, dan pemaksaan monopoli yang memengaruhi ekonomi lokal. Dampak sosial dari kebijakan VOC termasuk perubahan dalam struktur masyarakat tradisional dan peningkatan ketergantungan pada perdagangan dengan pihak kolonial. Meskipun VOC memiliki kekuasaan yang besar, perusahaan ini juga menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Korupsi di kalangan pejabat VOC, konflik dengan pesaing dagang, serta perlawanan dari penguasa lokal mengakibatkan penurunan efektivitas dan stabilitas VOC. Akhirnya, setelah beberapa abad beroperasi, VOC mengalami keruntuhan dan dibubarkan pada tahun 1799. Pembubaran VOC menandai pergeseran kekuasaan yang lebih langsung dari Belanda ke Indonesia, yang kemudian menjadi bagian integral dari Hindia Belanda di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dengan demikian, VOC memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah kolonial Indonesia, karena tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan politik, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat lokal. Penelitian dan pemahaman tentang VOC memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kekuatan kolonial Eropa mempengaruhi dan membentuk sejarah Indonesia pada masa lalu.

Sistem Monopoli dan Perdagangan VOC

Ternate, yang terletak di bagian timur Indonesia, telah lama dikenal sebagai pusat perdagang yang ramai. Kota ini menjadi tempat produksi berbagai bahan baku yang menarik para pedagang dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk bertransaksi, baik antar sesama pedagang maupun dengan penduduk setempat. Perjalanan perdagangan di Ternate merupakan sebuah epilog dari catatan panjang yang dimulai pada abad ke-16 dan ke-17, kala cengkeh dan pala menjadi komoditas yang mendominasi arus ekonomi. Keberadaan rempah-rempah ini menjadi katalis bagi perkembangan kota-kota pelabuhan, seperti Ternate, Tidore, Makian, Bacan, Sula, Ambon, Saparua, dan Banda, yang tumbuh subur di bawah naungan perdagangan rempah-rempah. Pada masa itu, muncul sekelompok pedagang menengah yang menjadi tulang punggung kegiatan perdagangan. Tahun 1854, kebijakan pelabuhan bebas diterapkan di Ternate, yang berdampak positif pada aktivitas perdagangan. Keadaan ini semakin diperkuat dengan dicabutnya larangan pemerintah kolonial Belanda terhadap perdagangan dengan Tiongkok. Sejak saat itu, pedagang Tionghoa mulai berdatangan dan menetap di Ternate, bahkan mengembangkan kegiatan ekonomi mereka hingga ke Papua.

Pedagang Tionghoa memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Ternate. Mereka tersebar di berbagai tempat strategis di Kepulauan Maluku, seperti Ternate, Labuha, Tobelo, Kau, Jailolo, Sidangoli, Dodinga, Bobane, Igo, Galela, Weda, Patani, Bicoli, Ngofakiaha, Sanana, Sailolof, Misool, dan Sekar. Berdasarkan lokasi dan fungsi mereka, pedagang di Ternate dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama beraktivitas di sekitar pelabuhan atau di pesisir pantai, yang umumnya diisi oleh pengusaha Belanda (eksportir). Kelompok kedua berfokus pada kegiatan ekonomi di pedalaman, yang diisi oleh pedagang menengah atau pedagang keliling, seperti pedagang Tionghoa, Bugis-Makassar, Jawa, dan Melayu. Kedatangan pedagang Tionghoa ke Ternate didorong oleh perubahan dan perkembangan di Eropa, khususnya meningkatnya aktivitas maritim dan komersial di sepanjang Jalur Sutra. Mereka mencari sumber daya yang baru dan banyak diperdagangkan di Indonesia, seperti cengkeh dan pala yang ada di Maluku. Kehadiran mereka di Ternate tidak hanya karena faktor internal di Tiongkok seperti perang, kelaparan, dan tantangan alam,

tetapi juga karena adanya peluang ekonomi baru. Ternate, sebagai kota komersial yang ramai, menjadi magnet bagi pedagang Tionghoa untuk menetap dan berdagang.

Jiwa dagang yang melekat kuat pada pedagang Tionghoa mendorong mereka untuk tidak hanya menjejalkan kaki di kota-kota pelabuhan, tetapi juga merambah hingga ke pelosok pedesaan. Jangkauan perdagangan mereka menelusuri pedalaman, khususnya di Halmahera dan Papua, membuktikan ambisi dan keuletan mereka dalam meraup keuntungan. Kemampuan mereka dalam mengelola kapal-kapal besar memungkinkan pengiriman komoditas dalam jumlah signifikan ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti Makassar, Surabaya, Batavia, dan Singapura, menandakan peran penting mereka dalam jaringan perdagangan regional. Peran mereka sebagai perantara dalam rantai perdagangan tidak dapat diabaikan. Mereka menjadi penghubung vital antara pembeli dan penjual, menjembatani kesenjangan antara bursaperdagangan utama (ekspor-impor) di pasar dan sekitar pelabuhan. Kehadiran mereka di setiap distrik menegaskan dominasi mereka dalam perdagangan lokal, menjadi bukti nyata dari pengaruh mereka dalam perekonomian Nusantara.

Menjelang akhir abad ke-19, peran pedagang Tionghoa sebagai perantara semakin menonjol seiring dengan derasnya arus investasi perkebunan yang digerakkan oleh pengusaha swasta. Mereka menjejalkan kaki di kota-kota besar dan kecil, mendirikan toko-toko yang menjadi pusat perdagangan produk-produk ekspor seperti kopra, damar, mutiara, teripang, sirip hiu, dan hasil hutan lainnya. Dominasi mereka dalam perdagangan komoditas ini menjadi bukti nyata dari pengaruh mereka yang semakin meluas dalam perekonomian Nusantara. Para pedagang Tionghoa tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga membangun hubungan sosial yang baik dengan penduduk setempat. Mereka memberikan kredit kepada penduduk Alfur, yang kemudian dibayar dengan hasil laut seperti mutiara, teripang, dan penyu. Sistem ini menunjukkan bagaimana pedagang Tionghoa tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Ternate telah menjadi pusat perdagangan yang penting di Indonesia bagian timur, dengan pedagang Tionghoa memainkan peran utama dalam perkembangan ekonominya. Mereka datang dengan motivasi untuk mencari peluang ekonomi baru, dan berhasil membangun jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Kehadiran mereka di Ternate telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah, budaya, dan ekonomi kota ini.

Hak Istimewa dan Kebijakan VOC

Pada awal abad ke-17, persaingan sengit di antara para pedagang Belanda yang berlayar ke Indonesia menyebabkan harga rempah-rempah di Eropa turun drastis. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa perusahaan dagang Belanda memutuskan untuk bergabung pada tahun 1602, membentuk sebuah organisasi dagang bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Pemerintah Belanda mendukung penuh VOC dengan memberikan hak istimewa (octrooy) selama 21 tahun, yang kemudian diperpanjang berkali-kali hingga tahun 1795. Hal ini memberikan VOC monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan Selat Magelhaens di Amerika Selatan. VOC tidak hanya berfokus pada perdagangan rempah-rempah, tekstil, sutra, dan porselen, tetapi juga memiliki wewenang politik di wilayah tersebut. Mereka dapat bernegosiasi dengan penguasa lokal, berperang, membangun benteng, memiliki pasukan sendiri, bahkan mengangkat penguasa di wilayah tersebut, semuanya atas nama pemerintah Belanda. Pembentukan VOC terjadi dalam konteks politik Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. VOC menjadi alat bagi Belanda untuk melawan Portugis di Asia, merebut benteng-benteng mereka, dan menguasai jaringan perdagangan mereka.

VOC memiliki enam kantor cabang (kamar) di Belanda, dengan Amsterdam memiliki perwakilan terbanyak karena memiliki modal terbesar. Meskipun tidak memiliki kantor pusat, VOC memiliki kantor koordinasi di Den Haag yang dipimpin oleh Heeren XVII. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki VOC, perusahaan dagang Belanda, diberikan hak-hak istimewa yang luar biasa oleh pemerintah Belanda (Staaten-General) setelah didirikan. Hak-hak istimewa ini disebut "Hak Oktroi" dan berlaku untuk jangka waktu tertentu, yang kemudian bisa diperpanjang. VOC diberikan hak ini selama 23 tahun dan terus diperpanjang hingga akhirnya mereka mengalami kebangkrutan. Hak Oktroi memberikan VOC kekuasaan yang sangat besar, hampir seperti sebuah negara merdeka. Mereka diberikan hak monopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan (Afrika) dan barat Selat Magelhaens (Amerika Selatan). Artinya, VOC bisa mengendalikan perdagangan di wilayah tersebut dan melarang siapapun untuk bersaing dengan mereka. Selain itu, VOC juga diberikan hak kedaulatan, yang memberi mereka kekuasaan seperti negara. Mereka dianggap sebagai perwakilan pemerintah Belanda di Asia, sehingga bisa mencetak dan mengedarkan uang sendiri, membuat perjanjian dengan negara lain, bahkan melakukan perang. VOC juga memiliki kekuasaan kehakiman, artinya mereka bisa menjalankan pengadilan sendiri. VOC juga diberi hak untuk mengangkat pegawai, membangun benteng pertahanan, memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri, dan menjalankan pemerintahan sendiri. Mereka bahkan diberi hak untuk merebut dan menduduki wilayah asing di luar Belanda, serta mengatur pemerintahan di wilayah tersebut. Dengan adanya hak-hak istimewa yang sangat besar ini, VOC memiliki kekuasaan yang luar biasa di wilayah jajahannya. Mereka bisa mengendalikan perdagangan, menjalankan pemerintahan, dan bahkan melakukan perang. Hak Oktroi ini menjadi kunci bagi VOC untuk membangun kekuasaan dan kekayaan mereka di Asia, tetapi juga menjadi sumber konflik dan penderitaan bagi penduduk lokal.

Politik *Divide et Impera* atau Politik Adu Domba

Manipulasi politik yang diterapkan oleh VOC, yang dikenal sebagai politik "divide et impera" (pecah belah dan kuasai), telah menebarkan benih perpecahan dan konflik di antara bangsa Indonesia. Perebutan tahta dan kekuasaan menjadi salah satu pemicu utama perselisihan, yang secara strategis dimanfaatkan oleh VOC untuk menguasai dan melemahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satu contoh nyata keberhasilan VOC dalam menerapkan politik ini adalah konflik perebutan takhta di Kerajaan Mataram. Perebutan kekuasaan yang terjadi di internal kerajaan telah menyebabkan melemahnya Mataram, yang kemudian terpecah menjadi empat kerajaan yang saling bertikai. Kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi VOC, yang dengan mudah memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat pengaruh mereka di wilayah tersebut. Contoh lainnya adalah Perang Makassar, yang terjadi antara VOC dan Kesultanan Gowa. Dalam perang ini, VOC berhasil menaklukkan Gowa dan Makassar dengan bantuan Raja Bone dan Arung Palakka, yang tengah berseteru dengan Sultan Hasanuddin. Politik *divide et impera* terbukti efektif dalam mengadu domba para penguasa pribumi, sehingga VOC dapat dengan mudah menguasai wilayah dan sumber daya yang mereka inginkan. Strategi "divide et impera" tidak hanya efektif dalam memicu konflik, tetapi juga dalam mempermudah VOC untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya. Dengan memecah belah para penguasa pribumi, VOC dapat dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan mereka dan memperkuat cengkeraman mereka di Nusantara. Melalui politik ini, VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengendalikan ekonomi di wilayah tersebut. Mereka juga berhasil menyingkirkan para penguasa pribumi yang menentang kebijakan mereka dan mengganti mereka dengan pemimpin boneka yang tunduk pada VOC.

Kebijakan VOC di Nusantara

Pada Saat kongsi dagang VOC mendapatkan hak khusus oleh pemerintah Kerajaan Belanda pada pembahasan sebelumnya, VOC menjalin hubungan kepada mataram dengan intensif pada zaman pemerintahan Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613-1646. Sejak VOC diberikan hak oktroi oleh pemerintah kerajaan belanda kongsi dagang ini memungkinkan mendirikan pemerintahan bagaikan sebuah negara dan memerintah wilayah yang di monopoli. Adanya keunggulan administrasi, birokrasi, dan kekuatan militer yang dimiliki, VOC memaksakkan diri untuk melakukan politik monopoli dalam perdagangan dan merupakan salah satu karakteristik dari kapitalisme. (Broundel, 1982). Pada masa VOC, pendidikan di Indonesia mulai diperkenalkan, meskipun dengan tujuan dan cara yang berbeda dengan tujuan pendidikan modern. VOC membangun sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan untuk mempersiapkan anak-anak untuk pendidikan yang lebih tinggi. Mereka juga mendirikan sekolah menengah pertama (setara dengan SMP) yang disebut Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah Rakyat (Volkschool) dibangun dengan bantuan masyarakat dan diawasi oleh Belanda. Guru-gurunya berasal dari penduduk pribumi. Meskipun pendidikan di masa VOC memiliki tujuan untuk memperkuat kekuasaan kolonial, kebijakan ini memiliki dampak positif bagi bangsa Indonesia. Pendidikan yang diberikan, meskipun terbatas, menghasilkan generasi muda yang terdidik dan memiliki pengetahuan. Generasi muda inilah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Belanda memiliki ambisi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Malaka, yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Mereka melihat peluang di Jayakarta, sebuah wilayah di Banten. di Jayakarta. Namun, Pangeran Jayakarta juga mengizinkan Inggris (EIC) untuk mendirikan kantor dagang di wilayah yang sama. Hal ini membuat Belanda tidak senang.

Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Coen, kemudian melakukan manuver. Ia membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta dan mencabut izin yang diberikan kepada EIC. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC terkabul. Dengan begitu, VOC mendapatkan kebebasan dan kelonggaran untuk berdagang di wilayah tersebut. Ini menjadi titik awal bagi VOC untuk semakin menguasai perdagangan di Indonesia. Tatkala demikian, ketika VOC melakukan kegiatan monopoli di nusantara, VOC terlebih dahulu melakukan konfotrasi dengan Portugis, Inggris, dan juga dengan pedagang pribumi. Meski pada tahun-tahun awal pembentukannya memberikan keuntungan yang besar tetapi tidak dengan militer. Satu-satunya keberhasilan besar VOC adalah pendudukan atas Ambon pada 1605. (Bernard H.M, 119). Dengan bersekutu kepada orang-orang muslim di Ambon, Belanda berhasil mengusir Portugis dan merebut benteng portugis dan memberi nama baru yaitu *Victoria* yang kemudian menjadi basis Gubernur Jenderal pertama *Pieter Both* yang diangkat pada tahun 1610 untuk mengurus benteng-benteng, kantor, orang, dan usaha VOC dari Asia (Tarmizy, 2012).

Pada tahun itu Ambon menjadi wilayah pertama di Indonesia yang menjadi koloni VOC dan Belanda dengan mulai memperoleh monopoli rempah-rempah dan barang dagang lainnya seperti pakaian yang sebelumnya dalam kendali Portugis, Gujarat, dan Bengali. Namun, VOC kurang dalam menguasai politik keuangan akhirnya tidak mampu menghambat perdagangan bahan-bahan pakaian oleh Portugis dan bangsa lainnya, oleh karena itu VOC melarang pengangkutan dengan kapal-kapal pribumi barang yang dibawah kendali Portugis, semua ekspor impor dihentikan dan bahkan lebih drastis nya lagi pohon-pohon pala dan cengkeh ditebang (Tarmizy, 2012). Pada tahun 1611, Pieter Both, seorang pemimpin VOC, berhasil melakukan kesepakatan dengan penguasa Jayakarta untuk membeli sebidang tanah. Tanah

yang luasnya sekitar 50 x 50 vadem (sekitar 182 cm per vadem), terletak di sebelah timur muara sungai Ciliwung. Di atas tanah inilah, Belanda kemudian membangun kota Batavia, yang menjadi pusat kekuasaan mereka di Jawa. Batavia menjadi tempat tinggal, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan bagi VOC. Di lokasi ini, mereka membangun gedung bertingkat dua yang terbuat dari batu, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kantor, dan gudang. Pieter Both tidak hanya fokus di Jawa. Ia juga berhasil menjalin hubungan baik dengan penguasa di Maluku, dan mendirikan pos perdagangan di Ambon. Pieter Both memilih Jayakarta sebagai pusat operasi VOC, bukan Banten, karena Banten sudah ramai dengan pedagang dan kantor dagang dari berbagai negara Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Jayakarta, atau Sunda Kelapa, pada saat itu masih menjadi pelabuhan kecil yang belum terlalu ramai.

VOC menerapkan aturan yang ketat di wilayah jajahannya, terutama di Maluku, untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Mereka menentukan jumlah dan jenis rempah-rempah yang boleh dijual oleh penduduk Maluku. Penduduk Maluku tidak boleh menjual rempah-rempah kepada siapapun selain VOC. VOC juga melakukan patroli laut yang disebut sebagai "patroli Hongi" untuk memastikan aturan mereka dipatuhi. Patroli ini menggunakan kapal tradisional yang disebut "kora-kora". Salah satu aturan yang diterapkan VOC adalah tentang penebangan tanaman rempah-rempah. VOC menetapkan batas jumlah tanaman yang boleh ditanam oleh penduduk Maluku. Jika ada yang melanggar aturan ini, petugas patroli Hongi akan langsung menindaklanjuti dengan menebang tanaman yang melebihi batas. Tujuannya adalah untuk menjaga harga rempah-rempah tetap stabil di pasar dunia. VOC melakukan penebangan cengkih secara besar-besaran di Maluku, yang disebut "Ekstiparsi". Tujuannya adalah untuk menjaga harga cengkih tetap stabil di pasar dunia. Namun, kebijakan ini membuat penduduk Maluku sangat tertekan. Mereka dipaksa untuk mengikuti aturan yang tidak adil dan tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Kekecewaan dan kemarahan penduduk Maluku akhirnya memicu pemberontakan.

VOC tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menumpas pemberontakan. Pada tahun 1621, di bawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen, VOC melakukan pembunuhan massal di Banda, menewaskan hampir 1000 orang. Tindakan kejam ini menunjukkan bahwa VOC lebih mementingkan keuntungan dan kekuasaan daripada nyawa manusia. Penduduk Maluku mengalami penderitaan yang mendalam akibat sistem monopoli dan pemaksaan yang diterapkan oleh VOC. Kejahatan VOC ini sulit dilupakan oleh rakyat Maluku. Pada tahun 1619, Jan Pieterzoon Coen diangkat menjadi gubernur jenderal VOC yang kedua. Dengan diangkatnya Coen sebagai gubernur jenderal menjadi penanda kebijaksanaan VOC yang semakin menegat salah satunya bentuk penggunaan kekerasan di berbagai tempat untuk membangun benteng-benteng dan kemudian memonopoli perdagangan (Tarmizy, 2012). Pada tahun yang sama setelah Coen diangkat menjadi gubernur jenderal VOC telah melakukan pembakaran sebagian besar wilayah Jepara dan perahu yang terdapat di pelabuhannya. Pada waktu yang sama, VOC memperkuat lojinya di Jakarta yang menjadi wilayah Banten meski dilarang oleh bupati pada saat itu. (Tarmizy, 2012). Pada Mei 1619, setelah pertarungan empat pihak antara Sultan Banten, Bupati Jakarta, pihak Inggris, dan Belanda, Coen melakukan pendaratan dengan 17 buah kapal dan membakar rumah kemudian mengusir penduduknya. Kemudian di tempat itu Coen membangun sebuah benteng yang memiliki pertahanan yang kuat dimana dengan itu ia mampu mengendalikan perdagangan Asia. (Tarmizy, 2012).

Runtuhnya VOC

Keruntuhan VOC dimulai sejak 1780-an yang terjadi akibat peningkatan biaya dan menurunnya hasil dari penjualan yang berakibat terhadap kerugian yang dialami oleh VOC, hal ini disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pegawai VOC di

asia tenggara dari pejabat rendah hingga tertinggi termasuk didalamnya para residen (Wahyudi, 2017). Misalnya, ketika beberapa para residen memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil produksi kepada mereka dengan harga yang sangat rendah dan kemudian dijual lagi kepada pihak VOC melalui kenalan atau kerabat yang menjadi pejabat VOC dengan harga yang sangat tinggi. Karena korupsi dan lemahnya pengawasan administrasi menjadi memicu konflik antara VOC dengan pemerintah kerajaan Belanda. Dengan berkurangnya keuntungan yang di distribusikan VOC ke Belanda yang disebabkan karena korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC di berbagai wilayah akhirnya kontrak VOC yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 1799 secara resmi dibubarkan akibat kontrak yang sudah jatuh tempo dan VOC terjerat hutang sehingga tidak mampu membayar perpanjangan kontrak lagi. Setelah VOC dibubarkan daerah-daerah kekuasaan VOC dan hutang VOC yang berjumlah sebesar 134 juta gulden diambil alih dan diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda sehingga demikian pemerintahan kolonial resmi dimulai dan ditangani oleh pemerintah kerajaan Belanda dengan menjalankan politik imperialisme secara sistematis untuk menguasai seluruh wilayah yang dulunya berada ditangan VOC dan menjadikannya sebagai daerah dengan otonomi khusus. Wilayah yang diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda dari VOC merupakan perpanjangan dari kerajaan Belanda yang dinamakan dengan Hindia-Belanda (Dutch-East Indies/ Nederlands-Indie) yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal sebagai perpanjangan raja atau ratu Belanda di daerah otonomi khusus tersebut.

KESIMPULAN

Masa pemerintahan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Indonesia berlangsung dari awal abad ke-17 hingga akhir abad ke-18. VOC awalnya datang sebagai perusahaan dagang yang didirikan oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu, VOC berubah menjadi kekuatan yang dominan di wilayah Hindia-Timur. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak untuk membentuk angkatan bersenjata, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, dan mendirikan benteng serta koloni. Dalam upaya menguasai perdagangan dan sumber daya, VOC menerapkan berbagai kebijakan monopoli perdagangan yang ketat, terutama pada komoditas seperti pala, cengkeh, dan lada. Mereka juga menerapkan sistem pajak yang berat, kerja paksa (rodi), dan sering kali menindas penduduk lokal serta penguasa setempat yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. VOC seringkali menggunakan kekerasan dan taktik *divide et impera* yaitu dengan memecah belah dan menguasai untuk tetap dapat mempertahankan kekuasaannya, dengan memanfaatkan persaingan antar kerajaan lokal. Kebijakan VOC yang eksploitatif menyebabkan penderitaan yang besar bagi rakyat Indonesia, dan ketidakpuasan ini sering kalimemicu perlawanan lokal. Pada akhir abad ke-18, VOC mulai menghadapi berbagai masalah, seperti korupsi internal, biaya perang yang tinggi, serta persaingan dari kekuatan Eropa lainnya. Akhirnya, VOC bangkrut pada tahun 1799, dan seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda, yang kemudian melanjutkan penjajahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. 2014. Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Yogyakarta: Pujangga Press
- Margana, Sri dan Widya Fitriyaningsih (ed.). 2010. Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global, Yogyakarta: Ombak
- Poesponegoro Djoened Marwati, Notosusanto Nugroho. (2019). Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan Penjajahan Indonesia (1700-1900). Jakarta : Balai Pustaka

- Reid, Anthony. 2011. Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 1995. Sejarah Indonesia Modern, Penerjemah: Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Wahyudi Samsi, Agustono Ragil. (2017). Peranan Jan Pieterzoon Coen Di Bidang Politik Dan Militer Tahun 1619-1623. Jurnal Swarnadwipa. 1 (1), 1-8